

Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015

Oleh : Moch. Jasin

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur

Abstrak

Asean Economic Community (AEC) merupakan bagian dari ASEAN Community selain bidang-bidang lainnya yang disepakati seperti ASEAN Political-Security Community dan ASEAN Socio-Culture Community yang dibentuk pada tahun 2003 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk melihat seberapa besarkah urgensi persiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015? Bagaimana progress implementasi AEC Blueprint yang telah dilaksanakan di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif analitik. Hasil penelitian ini adalah bahwa Indonesia dalam pencapaian AEC sudah berjalan mencapai perkembangan peraturan perdagangan bebas dan mulai bergerak mendekati pengembangan sistem kepabeanan serta pembebasan hambatan-hambatan dalam faktor produksi guna menghadapi penerapan Custom Union dan Common Market ditahap selanjutnya. Komitmen Indonesia sangat baik dalam implementasi AEC Blueprint.

Kata kunci : *ASEAN Economic Community (AEC), AEC Blueprint*

PENDAHULUAN

Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 menjadi tonggak awal terbentuknya kerjasama ekonomi ASEAN dimana pada awalnya tujuan dari deklarasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Seiring berjalannya waktu, kerjasama ekonomi dalam implementasinya berjalan relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan kerjasama lainnya di bidang politik-keamanan dan social budaya. Kerjasama ekonomi lebih diarahkan pada pembentukan sebuah komunitas ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*).

Asean Economic Community (AEC) merupakan bagian dari *ASEAN Community* selain bidang-bidang lainnya yang disepakati seperti *ASEAN Political-Security Community* dan *ASEAN Socio-Culture Community* yang dibentuk pada tahun 2003 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia. AEC sendiri baru akan dibentuk pada tahun 2015 dimana ASEAN menyepakati terwujudnya suatu integrasi ekonomi kawasan yang dalam implementasinya mengacu pada *AEC Blueprint*.

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara yang tergabung dalam

ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015 yang di dalamnya memuat empat pilar utama, yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Sebagai bagian dari salah satu pilar komunitas ini, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara anggota.

Dengan adanya AEC juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN ke arah yang lebih signifikan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang dalam AEC 2015 serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya AEC 2015 tidak terjadi, padahal negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam telah terus meningkatkan kualitas mereka dalam hal perekonomian. Perkembangan ICT (*information, communication, technology*), eskalasi pasar bebas antar negara yang semakin meningkat, iklim kompetisi di berbagai bidang kehidupan yang semakin ketat, demokrasi dan HAM, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia agar bisa hidup terus dan bertahan dalam percaturan kehidupan antar bangsa di dunia.¹

¹ Zamrozi, Paradigma Pendidikan di Masa Depan, Yogyakarta; Bayu Indra Grafika, 2000, h.158

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan dari penulisan karya tulis ini, yaitu:

1. Seberapa besarkah urgensi persiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi terwujudnya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 ?
2. Bagaimana progres implementasi AEC *Blueprint* yang telah dilaksanakan di Indonesia?

BAHAN DAN METODE

A. Konsep Regionalisme

Di dalam studi hubungan internasional, regionalisme sangat erat hubungannya dengan studi kawasan (*area studies*). Menurut Mansbaach, *region* atau kawasan adalah pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan interdependensi dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.² Lebih lanjut, hal terpenting dari kajian regionalisme adalah meninjau derajat keeratan (*level of cohesion*), struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan

politik (structure of relations) dalam suatu kawasan, serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerjasama regional tersebut.³

Proses menuju regionalisme memiliki beberapa tahapan, yakni; pertama, regionalisasi, yakni merujuk pada proses pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah, yang proses interaksi sosial dan ekonominya cenderung tidak terarah. Proses ini bersifat alami dimana dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga dan secara geografis berdekatan, melakukan serangkaian kerjasama guna memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri.⁴ Proses kedua adalah proses kesadaran dan identitas regional. Pada tataran ini, kesadaran regional merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat, misalnya sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau agama. Adakalanya kesadaran regional ini juga bersifat eksternal, terutama misalnya menyangkut masalah ancaman keamanan. Ketiga, proses

² Richard W. Mansbaach, dalam Nuraeni Suparman dkk, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, h.1

³ T. May Rudy, *Studi Kawasan; Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, Bandung; Bina Budaya, 1997, h.22

⁴ *Ibid*, h.39

regionalisme lebih dalam terikat lagi kedalam bentuk kerjasama regional antar negara. Kerjasama disini bisa memiliki tujuan yang sangat luas. Di satu sisi, kerjasama bisa menjadi sarana dalam merespon berbagai tantangan eksternal, di sisi lain kerjasama bisa dikembangkan guna menjamin tercapainya berbagai tujuan, nilai bersama atau sekedar untuk memecahkan masalah bersama.

Keempat, integrasi regional yang didukung oleh negara. Salah satu sub kategori penting dalam kerjasama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi regional melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang disusun untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa, dan manusia. Atau lebih lanjut bisa berupa perluasan penghapusan hambatan non-tarif, regulasi pasar dan pengembangan kebijakan bersama. Kelima, tahap kohesi regional. Pada level ini akan terbentuk ‘tujuan akhir tertentu’, yakni terbentuknya suatu komunitas politik yang baru. Fokusnya adalah penyatuan kedaulatan yang mengarah pada munculnya bentuk komunitas politik baru. Dalam konteks ini, Komunitas ASEAN 2015 (*ASEAN Community 2015*),

bisa dijadikan contoh tahapan kohesi regional di kawasan Asia Tenggara.⁵

Terdapat dua premis dasar untuk memahami regionalisme, yakni pertama, regionalisme dipandang sebagai tanggapan terhadap globalisasi. Kedua, regionalisme dipandang sebagai produk dari dinamika internal suatu kawasan, berikut motivasi dan strategi-strategi dari aktor-aktor regional.⁶ Senada dengan konsep regionalisme, peneliti juga berkenan untuk memberikan sedikit rujukan tentang makna komunitas, sebagai konsep turunan dari regionalisme.

Menurut Emmanuel Adler dan Michael Barnett, komunitas memiliki tiga karakteristik, yakni; (1) para anggota komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. (2) mereka yang berada dalam komunitas memiliki hubungan langsung, interaksi yang terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain khusus yang terisolasi, melainkan hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tatacara. (3) komunitas menunjukkan resiproitas yang mengekspresikan derajat tertentu

⁵ Andrew Hurrell, *Regionalism in World Politics*, US; Oxford University Press, 1995, h.39-45

⁶ Marry Farrel, “The Global Politics of Regionalism; An Introduction”, dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne, *Global Politics of Regionalism*, London; Pluto Press, 2005, h.120

kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan bersifat mementingkan orang lain (altruism); kepentingan jangka panjang didorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan altruism dapat dipahami sebagai suatu rasa kewajiban serta tanggung jawab.⁷

B. Teori Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi adalah rancangan dan implementasi serangkaian kebijakan khusus antar kelompok negara dalam region yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor produksi antar negara anggota. Integrasi ekonomi yang terbentuk meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya di antara negara-negara anggota yang sepakat akan membentuk suatu integrasi ekonomi.

⁷ Emmanuel Adler dan Michael Barnett dalam CPF. Luhulima, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, Jakarta; P2P LIPI, 2008, h.14-15

Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitasnya, yaitu:⁸

1. *Preferential Trading Arrangement* (PTA)

Merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). Contoh: *the Europe Agreements, the European Economic Area*, dll.

2. *Free Trade Area* (FTA)

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan di antara mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negara-negara bukan anggota. Contoh: India yang telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan ASEAN, Sri

⁸ Walter and Andrew, 2009:46

Lanka, Thailand (kesepakatan FTA lain dengan ASEAN), dll.

3. *Customs Union (CU)*

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan sesama mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragaman ketentuan. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa CU merupakan bentuk integrasi ekonomi yang mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Contoh: *European Union* dan *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*.

4. *Common Market (CM)*

Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. Jenis integrasi ini juga biasa

disebut *Single Integrated Market*, yaitu suatu bentuk integrasi dimana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Sebagai contoh, pembentukan pasar tunggal Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1987 dengan target selesai pada 31 Desember 1992.

5. *Economic Union (EU)*

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makro-ekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. *Economic Union* and *Monetary Union* (kesatuan ekonomi dan moneter) merupakan bentuk integrasi ekonomi dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Contohnya adalah Uni Eropa, ada pasar tunggalnya dan memakai satu kesatuan moneter (Euro).

6. *Total Economic Integration* (TEI) atau *Complete Economic Integration*

Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makro-ekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat “supra nasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya. Pada tahap ini, tidak lagi diperlukan kebijakan pengawasan ekonomi kepada unit-unit yang bergabung. Mereka telah menjadi satu kesatuan moneter dan fiskal secara penuh atau mendekati penuh. Uni Eropa adalah satu contoh yang baik mengenai integrasi ekonomi penuh.

C. *Konsep Post Agreement*

AEC sebagai salah satu pilar komunitas ASEAN merupakan hasil dari *post agreement negotiation* negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan melanjutkan dialog untuk mendorong kemajuan dan perkembangan dari implementasi perjanjian yang telah disepakati, kemudian proses negosiasi tersebut juga menjadi mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan kepentingan dalam implementasi perjanjian guna menciptakan solusi dan mencapai

kesepakatan yang akan ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Pada fase *post agreement negotiation* ini, aktivitas yang berlangsung diantaranya sebagai berikut:⁹

- Berpartisipasi aktif dalam forum berkelanjutan dimana negosiator dari persetujuan yang telah terbentuk dapat melanjutkan ke tahap dialog dan negosiasi yang lebih detail dan lebih luas.
- Memonitor dan mengevaluasi permohonan dari masing-masing negara berdasarkan ketentuan yang ada.
- Mencari solusi permasalahan dalam pengimplementasian persetujuan serta mengembangkan dan memperbaiki persetujuan yang telah ada.
- Bekerja sama dengan koalisi yang telah ada dan mengembangkan koalisi baru untuk mengimplementasikan persetujuan yang telah disepakati.

Selain itu, pada level domestik juga terjadi beberapa fase yang terkait dengan proses *Post Agreement Negotiation*, antara lain:

a) *Acceptance / Ratification Negotiation*

Negosiasi di tingkatan domestik yang berkonsentrasi pada penerimaan secara

⁹ Johnson Crister & Jonnas Talberg, 2008

formal persetujuan di level nasional. Negosiasi di level ini melibatkan beragam *stakeholder* meliputi menteri pemerintahan terkait, partai politik, kalangan bisnis, *NGOs* dan media.

b) *Rule-Making Negotiations*

Berkonsentrasi pada pengembangan atau perubahan yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan, kriteria, standar yang berlaku dan target yang ingin dicapai negara dalam perjanjian internasional tersebut. Peserta negosiasi ditahapan ini biasanya meliputi pembuat undang-undang, birokrat pemerintahan dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengubah peraturan.

c) *Enforcement, Monitoring and Reporting Negotiations*

Pada tahapan ini proses negosiasi berkonsentrasi pada metode dan pendekatan untuk pengimplementasian undang-undang dan peraturan yang baru. Pada tahapan ini biasanya dihasilkan hukum atau peraturan yang baru.

D. Teori Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan secara sederhana didefinisikan sebagai satu langkah dalam memilih berbagai alternatif yang ada. Dalam teori pengambilan

keputusan, para pengambil keputusan (Decision Makers) menganggap pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (the world as viewed) lebih penting dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri.¹⁰

Model pembuatan keputusan memiliki asumsi dasar perspektif bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Perspektif ini memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosedur-prosedur kelembagaannya.

Selanjutnya, ada 3 model dalam pembuatan keputusan politik luar negeri sebuah negara, yaitu:¹¹

a. Paradigma aktor rasional

Aktor yang diwakili oleh pemerintah membuat keputusan yang diambil dengan menganalisis tujuan, menetapkan pilihan, menghitung keuntungan dan biaya (*cost and benefit*) dari masing-masing pilihan, dan

¹⁰ Thomas Brewer, 2006:182-183

¹¹ Graham Allison, 2003:275-279

mencapai pilihan yang memberikan keuntungan maksimal.

b. Paradigma proses organisasi

Organisasi mengembangkan pandangan kolektif, persepsi dan prosedur, sehingga reaksi dapat diprediksi. Tujuan dari organisasi didominasi oleh kebutuhan untuk menjaga eksistensi organisasi dan menghindari ancaman-ancaman yang datang.

c. Paradigma politik birokrasi

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil politik dari konflik dan kerjasama antar individu. Masing-masing aktor memiliki posisi, persepsi dan kepentingan. Dalam pembuatan keputusan terdapat proses tawar-menawar (*bargaining*). Hasil yang didapat oleh setiap aktor akan tergantung dari kekuasaan yang dimilikinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi

dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.¹²

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta menganalisa bagaimana Indonesia melakukan persiapan dalam menghadapi AEC pada tahun 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet yang terkait dengan pembahasan masalah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling

¹² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal 6.

berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Persiapan Indonesia Menghadapi AEC 2015

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana transaksi perdagangan antar-negara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu terobosan dan kesempatan besar bagi negara yang siap dan mampu untuk mengembangkan perekonomiannya secara lintas batas. Secara sederhana, seberapa besar tingkat urgensi dari persiapan Indonesia menghadapi implementasi AEC 2015 dapat dikaji melalui besarnya manfaat dan peluang atau kesempatan yang dapat diterima Indonesia, tentunya dibandingkan pula dengan konsekuensi logis dampak/implikasi dari penerapan AEC 2015 tersebut.

Kesediaan Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya membentuk ASEAN Economic Community pada tahun 2015, tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan negara-

negara anggota ASEAN. Di dalamnya terdapat peluang atau kesempatan yang besar, dan tentunya tantangan. Integrasi ekonomi dalam AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan. Di Indonesia sendiri tahapan dari pencapaian AEC sudah berjalan mencapai perkembangan peraturan perdagangan bebas dan mulai bergerak mendekati pengembangan sistem kepabeanan serta pembebasan hambatan-hambatan dalam faktor produksi guna menghadapi penerapan *Custom Union* dan *Common Market* ditahap selanjutnya.

Peluang bagi Indonesia pada AEC 2015 adalah: dari sisi jumlah tenaga kerja, sebagian besar penduduk ASEAN (39,1%) berada di Indonesia. Indonesia dapat menawarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga bisa menjadi pusat industri. Dari sisi pasar produksi, besarnya jumlah penduduk di kawasan dan prospek perekonomian yang menjanjikan membuat kawasan ASEAN sebagai tujuan ekspor Indonesia. Dari sisi

peningkatan investasi, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, akan ditindaklanjuti dengan berbagai program kerjasama regional, maka ini akan memiliki nilai positif bagi semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Sedangkan tantangan yang muncul adalah bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan semua peluang yang ada di atas. Artinya, bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang berarti, maka Indonesia hanya menjadi negara tujuan pemasaran (objek) bagi kesepakatan Komunitas ASEAN 2015 (AEC). Persiapan yang matang dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia secara optimal menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk merealisasikannya. Pasalnya, Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN *Community* 2015) jika dilihat dari kacamata ekonomi, akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi aliran barang, jasa, investasi, modal dan tenaga terampil yang bebas.¹³

AEC adalah sebuah revolusi ekonomi ASEAN dimana menjadikan sebuah wilayah regional yang tidak memiliki batas untuk melakukan pergerakan

barang dan jasa serta tenaga kerja yang didukung oleh modal baik domestik maupun asing. Tujuan dari penyatuan ekonomi dan moneter adalah untuk membuat perekonomian berfungsi lebih baik, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan kemakmuran yang lebih besar bagi negara-negara anggota. Manfaat tersebut meliputi:

1) *Manfaat bagi Konsumen:*

- *Persaingan yang semakin meningkat.* Konsumen bisa berbelanja lebih mudah lintas batas negara serta membandingkan harga. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan karena kompetisi antar toko-toko dan pemasok semakin meningkat.
- *Harga lebih stabil.* Pasar tunggal dengan mata uang dan kebijakan moneter tunggal akan membuat inflasi rendah dan stabil.
- *Meminjam lebih mudah dan murah.* Inflasi dan suku bunga yang rendah dan stabil membuat setiap orang lebih mudah dan murah untuk meminjam, misalnya untuk membeli rumah.
- *Lebih mudah dan murah melakukan perjalanan.* Mata uang tunggal akan menghapuskan biaya pertukaran mata

¹³ Sjamsul Arifin, dkk. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global. Jakarta; Elex Media Komputindo, 2008

uang sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan.

2) *Manfaat bagi pelaku bisnis:*

- *Suku bunga rendah berarti investasi akan meningkat.* Inflasi yang rendah akan membuat suku bunga juga rendah sehingga memudahkan pelaku bisnis melakukan pinjaman untuk berinvestasi.
- *Stabilitas ekonomi mendorong perencanaan jangka panjang.* Inflasi dan suku bunga yang tidak stabil merupakan biaya atau risiko tak terduga bagi pelaku bisnis, hal ini membuat riskan bagi perusahaan untuk berinvestasi jangka panjang. Stabilitas ekonomi dibawah EMU mengurangi ketidakpastian dan mendorong investasi jangka panjang bagi perusahaan.
- *Risiko rendah mendorong perdagangan antar negara.* Perdagangan antar negara seringkali menggunakan mata uang yang berfluktuasi, sehingga untuk mengurangi atau mengimbangi risiko tersebut perusahaan akan menjual dengan harga tinggi di luar negeri. EMU dengan pasar dan mata uang

tunggal akan menghilangkan risiko tersebut.

- *Hilangnya biaya nilai tukar akan merangsang perdagangan dan investasi.* Mata uang tunggal akan menghilangkan biaya tukar yang tinggi antar negara ASEAN sehingga akan merangsang perdagangan dan investasi.

Selain manfaat di atas dan mungkin masih banyak manfaat lainnya dari integrasi ekonomi di ASEAN, terdapat juga beberapa konsekuensi negatif yang dapat terjadi, meliputi:

- Biaya kerusakan dalam efisiensi ekonomi mikro, setidaknya sementara. Biaya pertukaran ke mata uang baru dapat bervariasi dan dapat meliputi biaya administrasi, biaya hukum, biaya psikologis, dan biaya lainnya. Keadaan khusus terutama diterapkan ketika negara-negara anggota salah memilih nilai tukar paritas nominal. Hal ini akan menyebabkan daya saing negara anggota menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan daya saing negara-negara anggota lain.
- Kesempatan bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas makro-ekonomi mereka menurun, karena nantinya akan

menjadi tanggung jawab Bank Sentral bersama.

- Akan sulit menyatukan berbagai macam kepentingan. ASEAN dengan latar belakang ekonomi, sosial budaya, bahasa maupun sejarah yang berbeda-beda akan sangat sulit mewujudkan integritas ekonomi tanpa adanya kerjasama dan kerja keras serta perencanaan yang matang.

Progres Implementasi AEC Blueprint

Indonesia

Seperti dijelaskan sebelumnya, AEC *Blueprint* dilengkapi dengan jadwal strategik (*strategic schedule*) yang menjabarkan secara rinci kerangka waktu pencapaian setiap langkah-langkah yang harus diterapkan oleh negara anggota, dimulai pada tahun 2008 yang dibagi ke dalam empat tahapan: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015. Dengan diimplementasikannya AEC, maka segala bentuk pajak dan tarif dihilangkan berdasarkan prioritas sektor yang disetujui, sedangkan segala faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal diijinkan bergerak bebas melewati tapal batas negara anggota ASEAN.

AEC *Blueprint* juga akan dimonitor secara reguler setiap enam bulan dengan

mempertimbangkan perubahan regional dan internasional, serta menggunakan *scorecard* untuk menilai kemajuan yang dicapai. Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015.

Indonesia merupakan koordinator untuk sektor otomotif dan produk berbasis kayu. Namun untuk sektor otomotif, bukan Indonesia, Malaysia atau Thailand yang menjadi investor otomotif di ASEAN, melainkan Jepang dan AS yang mampu mengembangkan dan mengintegrasikan produk dan pemasaran produk otomotif di Asia Tenggara. Kendati demikian, pemerintah Indonesia terus mengembangkan kebijakan terpadu bagi industri otomotif untuk pasar ekspor maupun pasar dalam negeri, memperkuat struktur industri dan investasi di bidang otomotif.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan AEC *Blueprint* perlu menyesuaikan komitmen AEC *Blueprint* tersebut dengan tujuan dan agenda nasional (*roadmap*) serta peraturan terkait di dalam negeri. Berdasarkan fungsi pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah, sehingga dapat berperan dalam mendorong seefektif mungkin AEC melalui pembuatan PETA STRATEGI Indonesia agar bisa mencapai hasil yang sudah ditargetkan. Jadi harus jelas, seperti apa targetnya, dan bukan sekedar hanya memantau, termasuk akan mendiskusikan secara jelas masalah teknisnya.

Untuk pelaksanaan komitmen AEC Blueprint di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para pejabat terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen cetak biru Masyarakat Ekonomi Asean (AEC) Tahun 2011. Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011. Ditegaskan dalam Inpres tersebut bahwa dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan berpedoman kepada tiga program, yakni:

1. Program menuju pasar tunggal dan basis produksi, yang antara lain: fokus kepada peningkatan daya saing dan pemanfaatan komitmen AEC serta komitmen AEC untuk arus barang dan arus jasa secara bebas.

2. Program menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi, yang fokus kepada kebijakan persaingan, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan perdagangan secara elektronik.
3. Program menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang, yang fokus kepada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.

Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen AEC Blueprint tersebut merupakan kelanjutan dari Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Implementasi AEC Blueprint di Indonesia pada tahap awal setidaknya terdiri dari 4 paket Instruksi Presiden (Inpres) yang telah dikeluarkan, yakni paket Inpres No. 3 Tahun 2006, paket Inpres No. 6 Tahun 2007, paket Inpres No. 5 Tahun 2008-2009 dan paket Inpres No. 11 Tahun 2011. Selain mengacu terhadap peta panduan kebijakan tersebut, kebijakan Indonesia dalam menghadapi implementasi AEC Blueprint juga dijabarkan melalui langkah-langkah konkret diantaranya: melalui peningkatan daya saing ekonomi, reformasi kelembagaan dan pemerintah, reformasi regulasi, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan UMKM,

penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan partisipasi dan awareness seluruh elemen negara dan pelaksanaan komitmen sesuai jadwal AEC Blueprint.

Strategi lain Indonesia dalam mengintegrasikan ekonominya ke dalam AEC Blueprint adalah dengan melakukan dukungan terhadap Pasar Produk Dalam Negeri. Dukungan tersebut diantaranya adalah:

- Penggunaan produk dalam negeri dan pengembangan ekonomi kreatif (bahkan telah dibentuk kementerian khusus untuk menangani hal tersebut, yang bergabung bersama Kementerian Pariwisata.
- Menciptakan perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif melalui reformasi kebijakan pendukung investasi.
- Pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus.
- Melakukan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha dan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari negara mitra FTA.

Sementara itu untuk melakukan penguatan daya saing global, Indonesia menetapkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lebih lanjut juga dilakukan perbaikan pelayanan publik (*National Single Window/NSW*), *National Infrastructure Quality*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

SIMPULAN DAN SARAN

berikut ini disimpulkan butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia yang dihasilkan pada Rapat Koordinasi Nasional KADIN 2008 dalam rangka pengembangan sektor perdagangan dan daya saing Indonesia di masa mendatang khususnya untuk tahun 2009-2014. *Pertama*, meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam menghadapi peningkatan kompetisi di masa-masa mendatang. *Kedua*, keberpihakan pada kepentingan nasional. Ruang gerak bagi perusahaan nasional cenderung semakin sempit sejalan dengan peningkatan kompetisi dan semakin banyaknya pesaing global di pasar Indonesia. *Ketiga*, memperlambat laju liberalisasi perdagangan. Percepatan laju liberalisasi perdagangan pada beberapa dasawarsa terakhir telah

membuat sebagian pelaku usaha dan produk Indonesia relatif terengah-engah untuk bersaing dengan kompetitor global. Perlu diberikan kesempatan selama periode tertentu bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya menghadapi ancaman krisis ekonomi global, untuk menata diri dan meningkatkan daya saingnya. *Keempat*, meningkatkan penggunaan produk Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah serta langkah bersama dunia usaha dan masyarakat terbukti efektif untuk meningkatkan penggunaan dan kegemaran pada produk Indonesia. *Kelima*, meningkatkan promosi ekspor terpadu. Diperlukan keterpaduan promosi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan maupun program. *Keenam*, meningkatkan kiprah ekspor UKM. Penyediaan fasilitas, program pelatihan dan pendanaan bagi usaha berskala kecil dan menengah perlu terus ditingkatkan, khususnya kiprah UKM dalam perdagangan internasional. *Ketujuh*, menata sistem perdagangan nasional. Perubahan peta kompetisi dan aturan main perdagangan dunia menuntut penataan menyeluruh atas sistem perdagangan Indonesia, termasuk di dalamnya menuntaskan RUU Perdagangan yang masih tertunda penyelesaiannya untuk

memberi pedoman usaha perdagangan lebih jelas dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. *Kedelapan*, Membangun Sinergi Peran perdagangan dalam perekonomian nasional semakin penting dan membutuhkan keterpaduan langkah dari segenap pihak terkait. Diperlukan sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan kontribusi perdagangan dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA :

- Andrew Hurrell, *Regionalism in World Politics, US*; Oxford University Press, 1995, h.39-45
- Emmanuel Adler dan Michael Barnett dalam CPF. Luhulima, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju komunitas ASEAN 2015*, Jakarta; P2P LIPI, 2008, h.14-15
- Hettne, *Global Politics of Regionalism*, London; Pluto Press, 2005, h.120
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal 6.
- Marry Farrel, "The Global Politics of Regionalism; An Introduction", dalam Marry Farrel dan Bjorn
- Richard W. Mansbaach, dalam Nuraeni Suparman dkk, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, h.1
- Sjamsul Arifin, dkk. *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi*

- Global. Jakarta; Elex Media
Komputindo, 2008
- T. May Rudy, Studi Kawasan; Sejarah
Diplomasi dan Perkembangan Politik
di Asia, Bandung; Bina Budaya,
1997, h.22
- Zamrozi, Paradigma Pendidikan di Masa
Depan, Yogyakarta; Bayu Indra
Grafika, 2000, h.158